

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Grand Theory*

2.1.1.1 Pertahanan Negara Indonesia

Peneliti menggunakan konsep Pertahanan Negara yang disusun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Usaha tersebut didasarkan pada penilaian terhadap pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi. Ancaman terhadap kedaulatan negara telah berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik) dari yang sebelumnya hanya pada ranah konvensional.

Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa dalam menanggulangi setiap ancaman. Untuk menghadapi ancaman militer, TNI bertindak sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sementara untuk menghadapi ancaman non militer, unsur utama menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan yang kemudian disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah setiap usaha untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman tradisional maupun non tradisional dengan mengerahkan lembaga pemerintah baik di bidang pertahanan maupun di luar bidang pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang sedang dihadapi. Konsep pertahanan negara digunakan untuk menganalisis usaha politik luar negeri dan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Australia dalam menghadapi internasionalisasi isu Papua di Pasifik Selatan.

2.1.1.2 Regional Security Complex Theory (RSCT)

Peneliti menganalisis hubungan Australia-Pasifik Selatan dengan menggunakan Regional Security Complex Theory (RSCT) yang ditulis oleh Buzan dalam *Security: A New Framework for Analysis* dan *Region and Powers: The Structures of International Studies*. Ide pokok dari RSCT adalah “*since most threats travel more easily over short distances than over long ones, security interdependence is normally patterned into regionally based clusters: security complexes*” (Buzan & Waever, 2003). Yang dimaksud dengan *region* di sini adalah “*the level where states or other units link together sufficiently closely that their securities cannot be considered separate from each other*”. Dengan demikian, “*security complexes are regions as seen through the lens of security*”.

Menurut RSCT, *regional security complex* (RSC) adalah “*a set of units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from each other*” (Buzan et al., 1998). Sekuritisasi terjadi ketika masalah keamanan “*is posited (by a securitising actor) as a threat to the survival of some referent object (nation, state, the liberal international economic order, the rain forests), which is claimed to have a right to survive. Since a question of survival necessarily involves a point of no return at which it will be too late to act, it is not defensible to leave this issue to normal*

politics. The securitising actor therefore claims a right to use extraordinary means or break normal rules, for reasons of security". Sedangkan desekuritisasi terjadi ketika "*actors stop treating each other as security problems and start behaving as friends*".

Untuk mengidentifikasi RSC diperlukan analisis mengenai wacana keamanan dan praktik keamanan dari para aktor yang terlibat untuk menemukan bagaimana negara mendefinisikan masalah keamanan dan bagaimana mereka berinteraksi dalam menangani hal tersebut. Interaksi inilah yang menghasilkan interdependensi keamanan, yang kemudian membedakan suatu RSC dari wilayah keamanan lainnya. Suatu RSC terdiri dari "pola persaingan, keseimbangan kekuatan, dan pola aliansi di antara kekuatan utama di dalam kawasan". Oleh karena itu, RSC biasanya didefinisikan oleh "*durable patterns of amity and enmity*". *Amity* adalah hubungan antar negara yang bersifat kooperatif. Negara menjalin hubungan baik untuk kemudian dapat menghasilkan suatu dukungan atau persahabatan sampai dengan ekspektasi perlindungan satu sama lain. Di sisi lain, *enmity* adalah hubungan antar negara yang bersifat konflikual. Negara berhubungan dengan negara lain atas dasar kecurigaan dan rasa takut yang timbul di antara keduanya. *Patterns of amity and enmity* dapat datang dari faktor geografis, kepentingan kelompok, ideologi, sejarah, serta distribusi kekuasaan di mana negara-negara tersebut berada. *Great powers* juga dapat menembus wilayah untuk mendominasi sehingga hubungan keamanan lokal dapat berhenti berjalan. Hal tersebut dapat mengakibatkan *overlay* yang menghambat terbentuknya RSC.

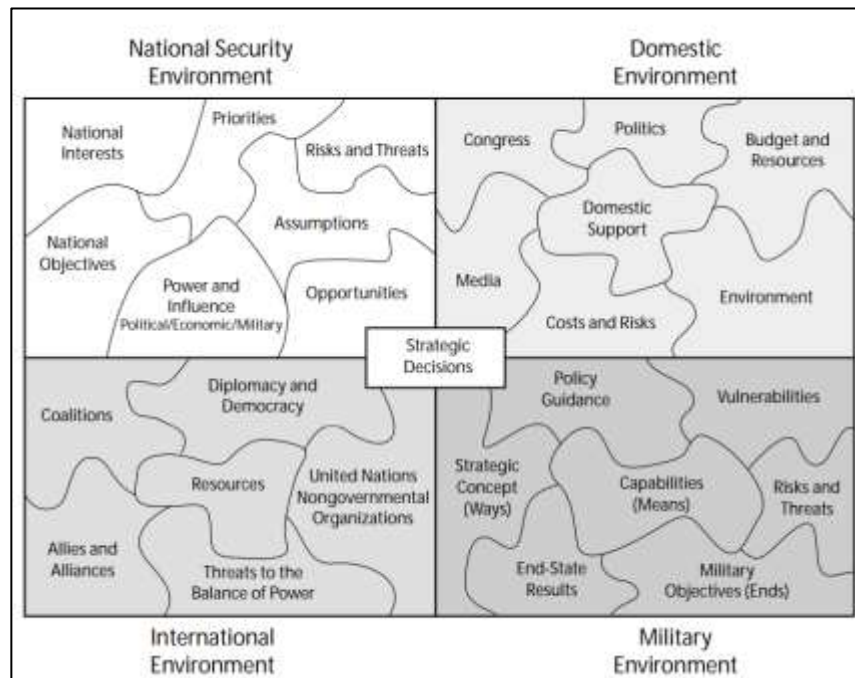
Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa RSCT berfungsi untuk menganalisis dinamika hubungan dua negara atau lebih dalam suatu kawasan karena ancaman dan keamanan suatu negara dipengaruhi oleh negara-negara lain di dekatnya. Untuk itu RSCT digunakan untuk menganalisis posisi strategis Australia di Pasifik Selatan melalui *pattern of amity dan enmity*. Asumsi awal dari peneliti adalah

hubungan Australia dan Pasifik Selatan terus mengalami dinamika. *Patterns of amity dan enmity* datang dan pergi sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak dalam waktu tertentu. Namun begitu, di tengah fenomena saling ketergantungan, munculnya ancaman, dan sekuritisasi isu yang kian meningkat, para aktor lebih menonjolkan aspek *amity* daripada aspek *enmity* dalam konteks keamanan di Pasifik Selatan

2.1.2 Middle Theory

2.1.2.1 Teori Lingkungan Strategis

Peneliti menambahkan analisis posisi strategis Australia dengan menggunakan teori Lingkungan Strategis oleh Libor Frank dan W. Michael Guillot masing-masing dalam *The Czech Republic Security Environment* dan *Strategic Leadership: Defining the Challenge*. Guillot (2003) berpendapat bahwa lingkungan strategis adalah satu konstruksi mencakup empat bagian yang berbeda dan saling terkait yaitu keamanan nasional, lingkungan domestik, militer, dan lingkungan internasional. Lingkungan strategis terdiri dari berbagai faktor dan aktor dalam konsepsi di bidang politik dan militer yang dapat saling terkait, saling melengkapi, dan bahkan saling bertentangan. Gambaran lingkungan strategis menurut Guillot dapat tergambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Lingkungan Strategis

Sumber: Guillot (2003)

Sama seperti Guillot, definisi mengenai lingkungan strategis menurut Frank (2020) juga dapat dilihat dari sudut pandang fungsi-struktural para aktor, karakteristik aktor, penilaian terhadap nilai-nilai yang dilindungi dari suatu bangsa (kepentingan nasional), dan kemampuan serta instrumen suatu bangsa dalam melakukan aktivitas di dalam sistem internasional. Maka dari itu, deskripsi lingkungan strategis dapat digambarkan melalui penentuan persepsi atau ciri khas dari lingkungan tersebut, konteks geopolitik, ancaman, dan kekuatan militer dari negara. Selain itu, lingkungan strategis dapat dilihat sebagai area di mana kepentingan nasional diimplementasikan dan di mana kepentingan tersebut berhadapan dengan kepentingan aktor lain dalam sistem hubungan internasional. Hubungan timbal balik dan interaksi dalam suatu lingkungan strategis penting bagi keamanan karena negara atau *reference object* lain dapat terancam atau menghadapi ancaman. Frank membagi lingkungan strategis berdasarkan sudut pandang teritorial berdasarkan level yang dapat

menggambarkan ruang lingkup secara geografis dan tingkat pengaruh negara dalam suatu lingkungan strategis. Pertama adalah *immediate security environment* yang mencakup negara tetangga terdekat dengan batas teritorial langsung yang berkontribusi pada situasi krisis dan integrasi regional, politik, dan ekonomi. Kedua adalah *close security environment* yang mencakup kawasan regional yang lebih luas dan memiliki kontribusi yang implisit dan tidak langsung. Ketiga adalah *wide security environment* yang mencakup negara-negara major power dunia dengan pengaruh yang sangat terbatas.

2.1.2.2 Teori *Regional Power* (Kekuatan Regional)

Peneliti menggunakan teori Kekuatan Regional yang ditulis oleh Maxi Schoeman dalam *South Africa as an Emerging Middle Power* dan Nolte dalam *How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research Topics*. Istilah kekuatan regional mengacu pada fenomena di mana suatu negara mempunyai *power* atau kekuatan terhadap negara-negara lain yang berada dalam suatu kawasan geografis tertentu (Flemes, 2016). Kekuatan regional tersebut mempunyai tanggung jawab khusus terhadap keamanan dan ketertiban regional. Untuk itu Maxi Schoeman (2000) mengajukan beberapa persyaratan bagi kekuatan regional untuk dapat dipenuhi yaitu berupa:

- a. Dinamika internal memungkinkan kekuatan regional untuk memainkan peran utama dan peran stabilisasi di wilayahnya.
- b. Keadaan tersebut ditunjukkan dengan kesediaan, kapasitas, dan kemampuan sebagai pemimpin dan stabilisator perdamaian.
- c. Harus dapat diterima oleh tetangga atau anggota dari kompleks keamanan di mana kekuatan regional tersebut bertanggung jawab atas keamanan dan perdamaian wilayah.

Selain itu Stefan Schirm (dalam Nolte, 2010, p.892) mendefinisikan kekuatan regional melalui kombinasi *hard power* dengan peran serta

penerimaan dari negara-negara lain. Beberapa kriteria guna proses klasifikasi sebuah negara sebagai kekuatan regional adalah sebagai berikut:

- a. Peranan sebagai pemimpin dikomunikasikan kepada aktor lain.
- b. Adanya proyeksi kekuatan melalui materi dan sumber daya organisasi.
- c. Terdapat penghormatan terhadap klaim kepemimpinan.
- d. Pengakuan dan penerimaan status kepemimpinan oleh aktor regional maupun aktor di luar regional.
- e. Pengaruh politik secara nyata di wilayah yang dipimpin.

Berdasarkan beberapa sumber definisi kekuatan regional tersebut, Nolte (2010) menawarkan beberapa kriteria utama (dapat berbeda-beda tergantung bagaimana kekuatan regional bertindak) untuk mengidentifikasi kekuatan regional menjadi beberapa macam sebagai berikut:

- a. Konsepsi diri sebagai pemimpin dalam suatu wilayah yang secara geografis, ekonomi, dan politik dibatasi.
- b. Menampilkan materi (militer, ekonomi, demografi), politik, dan ideologi untuk proyeksi kekuatan regional.
- c. Berpengaruh besar dalam urusan regional.
- d. Secara ekonomi, politik, dan budaya berhubungan dengan regional.
- e. Secara signifikan memengaruhi geopolitik regional.
- f. Berpengaruh dalam struktur pemerintahan regional.
- g. Berperan dalam identitas dan proyek regional.
- h. Penyedia barang kolektif.
- i. Berperan mendefinisikan agenda keamanan regional.
- j. Diakui oleh negara-negara regional.
- k. Terintegrasi dalam forum dan institusi regional maupun global.

Berdasarkan tinjauan mengenai teori kekuatan regional dari beberapa ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kekuatan regional

merupakan bentuk pemberian dan penerimaan pengaruh oleh suatu negara terhadap suatu kawasan dengan tujuan proyeksi kekuatan regional. Peneliti menggunakan teori tersebut untuk menganalisis pengaruh, peran, dan proyeksi kekuatan Australia di Pasifik Selatan. Pencapaian stabilitas dan keamanan merupakan tujuan utama dari adanya kekuatan regional. Asumsi awal peneliti adalah Australia masih menjadi kekuatan regional di Pasifik Selatan meskipun peran kekuatan eksternal mulai besar dan berdampak pada kepemimpinan Australia di wilayah tersebut.

2.1.2.3 Konsep *Secession* (Pemisahan Diri)

Peneliti menggunakan konsep *Secession* yang ditulis oleh Najafov dalam *Internationalization of Ethnic Conflicts and Impact on Regional and International Security*. Buchanan (1991) berusaha menjelaskan konsep *secession* dengan membandingkannya dengan konsep lain seperti revolusi, pembangkangan sipil, dan emigrasi. Tidak seperti kaum revolusioner, tujuan utama kaum separatis bukanlah untuk menggulingkan pemerintah yang ada, atau membuat konstitusi fundamental, perubahan ekonomi, atau sosial politik dalam negara yang sudah ada. Mereka ingin membatasi yurisdiksi negara yang bersangkutan agar tidak memasukkan kelompoknya sendiri dan wilayah yang didudukinya. Pada konsep pembangkangan sipil, mereka tidak ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Sebaliknya mereka secara sengaja dan terbuka melanggar hukum atau Undang-Undang yang berlaku dan menentang kebijakan pemerintah atas dasar moralitas politik. Definisi mengenai pembangkangan sipil sesuai dengan tujuan pemisahan diri. Contoh nyatanya adalah protes Gandhi kepada pemerintah Inggris dengan tujuan memisahkan India dari Kerajaan Inggris, dan bukan untuk menggulingkan pemerintah Inggris yang sedang berkuasa. Sedangkan jika dibandingkan dengan emigrasi, *secession* lebih kepada upaya untuk menghapus diri dari ruang lingkup kekuasaan negara, bukan dengan bergerak melampaui batas-batas otoritas yang ada. Usaha pemisahan diri harus melibatkan klaim terhadap wilayah tertentu. Sebagai

kesimpulan, yang dimaksud dengan *secession* adalah usaha pemisahan diri dari entitas yang lebih besar seperti negara dengan cara membatasi wewenang yuridiksi negara tersebut terhadap wilayah yang diklaim oleh kaum separatis.

Dalam perjalanannya, usaha pemisahan diri dapat menimbulkan konflik domestik antara negara dengan kaum separatis. Konflik domestik pertama kali dipandang sebagai suatu permasalahan yang hanya berdampak pada kondisi dalam negeri suatu negara. Namun pada era globalisasi dan modernisasi, suatu konflik domestik mempunyai potensi terhadap keamanan regional dan internasional. Benjamin Reilly (2002) menuliskan keterkaitan antara konflik domestik di Asia-Pasifik dengan keamanan regional dan internasional sebagai berikut:

In the past, regional security and internal conflict were usually seen as separate issues. However, there are clear—and increasing—regional and international security implications arising from the explosion of intra-state conflict in the Asia–Pacific region. In fact, most of the region’s internal conflict have an international dimension. Artificial colonial boundaries dividing culturally kin groups between states are one recurring problem and, combined with the ease of movement and open borders that characterize much of the region, emphasize the impossibility of quarantining the internal and external dimensions of regional security. (p. 18)

Konsep internasionalisasi dalam era modern telah memiliki konteks yang meluas. Najafov (2017) dalam sebuah artikel berjudul *Internationalization of Ethnic Conflicts and Impact on Regional and International Security* menuliskan bahwa konsep internasionalisasi telah dipahami sebagai sebuah aksi intervensi dari aktor eksternal terhadap politik domestik suatu negara termasuk manajemen dan resolusinya. Dalam perkembangannya internasionalisasi konflik (seperti *secession*) akan menimbulkan beberapa permasalahan terhadap keamanan regional seperti:

- a. Pengungsi, suatu konflik di suatu negara tidak mengenal lawan. Dampaknya adalah para penduduk menjadi tidak mempunyai tempat

tinggal dan harus berpindah ke negara di sekitar, yang berpotensi menjadi masalah baru jika tidak didukung dengan sumber daya yang memadai.

- b. Ekonomi, di mana konflik memiliki efek pengganda pada terganggunya aktivitas perdagangan, transportasi, komunikasi, dan sumber energi antar negara.
- c. Militer, di mana suatu konflik berdampak pada pengerahan kekuatan militer negara-negara di sekitar.
- d. *Instability*, di mana konflik berdampak pada pembentukan instabilitas di kawasan regional.
- e. Peperangan antar negara, di mana konflik dapat menimbulkan konflik kepentingan antar negara seperti batas-batas teritorial.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa *secession* dan internasionalisasi konflik dapat berpengaruh terhadap dinamika keamanan regional dan internasional karena menciptakan permasalahan-permasalahan baru bagi lingkup global. Dalam konteks isu Papua di Pasifik Selatan, penelitian ini berusaha untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan aktivitas internasionalisasi tersebut terhadap keamanan regional di Pasifik Selatan serta pengaruhnya bagi negara-negara di kawasan. Perbedaan dukungan dari negara-negara di Pasifik Selatan terhadap kedaulatan Indonesia dan kemerdekaan Papua dapat berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan di kawasan. Hal tersebut tentu saja berdampak pada posisi Australia jika dilihat dari kaca mata kekuatan regional di Pasifik Selatan.

2.1.3 Applied Theory

2.1.3.1 Teori Posisi Strategis

Peneliti menganalisis posisi strategis Australia menggunakan teori Posisi Strategis yang ditawarkan oleh Johnson dkk. dalam buku yang

berjudul *Exploring Corporate Strategy*. Menurut Johnson dkk (2008) posisi strategis berkaitan dengan identifikasi dampak pada strategi lingkungan eksternal, kemampuan strategis organisasi (sumber daya dan kompetensi), serta harapan dan pengaruh dari pemangku kepentingan. Pertimbangan mengenai lingkungan, kemampuan strategis, harapan dan tujuan dalam kerangka kerja politik dan budaya dari suatu organisasi memberikan pemahaman mendasar mengenai posisi strategis dari organisasi tersebut. Penilaian posisi strategis suatu organisasi terdiri dari dua analisis.

- a. Lingkungan. Organisasi ada dalam konteks politik yang kompleks, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan dunia hukum. Lingkungan ini berubah dan lebih kompleks untuk beberapa organisasi daripada yang lain. Bagaimana hal ini memengaruhi organisasi dapat mencakup pemahaman tentang dampak historis dan lingkungan, serta perubahan yang diharapkan atau potensial dalam variabel lingkungan. Banyak dari variabel tersebut akan menimbulkan *opportunities* (peluang) dan yang lain akan memberikan *threats* (ancaman) pada organisasi atau keduanya. Masalah yang harus dihadapi adalah bahwa rentang variabel cenderung sangat besar sehingga mungkin tidak mungkin atau realistis untuk mengidentifikasi dan memahami masing-masing. Oleh karena itu, perlu untuk menyaring dari kompleksitas ini pandangan tentang dampak lingkungan utama pada organisasi.
- b. Kemampuan strategis organisasi. Terdiri dari sumber daya dan kompetensi. Salah satu cara berpikir tentang kemampuan strategis suatu organisasi adalah dengan mempertimbangkan *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan) (misalnya, di mana ia berada pada keuntungan atau kerugian kompetitif). Tujuannya adalah untuk membentuk pandangan tentang pengaruh internal dan kendala pada pilihan strategis untuk masa depan. Biasanya kombinasi sumber daya dan kompetensi tingkat tinggi dalam kegiatan tertentu

(kompetensi inti) yang memberikan keunggulan yang sulit ditiru oleh pesaing.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan posisi strategis adalah posisi yang dimiliki oleh suatu aktor dalam berdasarkan penilaian dari lingkungan internal dan eksternal serta dampak yang ditimbulkan oleh aktor tersebut terhadap lingkungan di sekitarnya. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis posisi strategis Australia dalam membantu Indonesia menghadapi isu Papua di Pasifik Selatan. Posisi strategis didapatkan melalui analisis peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan Australia terhadap kawasan Pasifik Selatan dalam konteks isu Papua.

2.1.3.2 Teori Strategi

Peneliti menggunakan teori Strategi yang ditulis oleh Terry Deibel dalam *Foreign affairs strategy: Logic for American Statecraft* dan Arthur F. Lykke dalam *Toward an Understanding of Military Strategy*. Terry Deibel (2007) mendefinisikan strategi sebagai sebuah rencana dalam menerapkan sumber daya (*resources*) untuk mencapai sasaran (*objectives*); dengan demikian strategi tidak dapat dipisahkan dari pemikiran (*thought*) dan tindakan (*action*) antara sarana (*means*) dan tujuan (*ends*), sumber daya dan sasaran, kuasa (*power*) dan maksud (*purpose*), kemampuan (*capability*) dan niat (*intentions*) dalam setiap bidang aktivitas manusia. Menurut Deibel, perumusan strategi politik luar negeri merupakan fungsi dari kepentingan dan kemampuan aktor. Selain itu, rumusan tersebut merupakan perhitungan dari peluang, ancaman, dan kendala yang ditimbulkan oleh lingkungan domestik dan internasional.

Sasaran adalah bagian dari kepentingan nasional yang bersifat lebih spesifik serta telah mempertimbangkan *cost* dan *risk*. Sedangkan instrumen (bagian dari *means*), berbeda dari kuasa yang bersifat laten, merupakan bentuk kekuatan aktual yang dapat dimobilisasi. Penggunaan instrumen

bergantung pada penilaian aktor terhadap ancaman dan peluang. Instrumen menunjukkan *ways* (menghubungkan *ends* dan *means*) dalam strategi politik luar negeri. Pelaksanaan *ways* ditentukan oleh beberapa faktor seperti kondisional – aktual atau prospektif; kerahasiaan – terbuka atau tertutup; jumlah instrumen – tunggal atau jamak; tertib kebijakan – pemilihan waktu dan urutan penerapan keputusan.

Dengan gagasan yang hampir sama, Lykke (2001) merumuskan teori Strategi dari pemikiran Jenderal Maxwell D. Taylor ketika berkunjung to the U. S. Army War College in 1981 yang menjelaskan bahwa strategi terdiri dari tiga unsur utama yaitu sasaran (*objectives/ends*), cara (*ways*), dan sarana (*means*). Konsep umum tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk perumusan berbagai macam strategi seperti militer, politik, dan ekonomi tergantung pada elemen kekuatan nasional yang digunakan. Dengan menggunakan konsep umum tersebut, Lykke mengembangkan konsep strategi dengan pendekatan militer. *Ends* dapat dinyatakan sebagai tujuan militer yaitu berupa kebijakan nasional. *Ways* berkaitan dengan metode penerapan kekuatan militer yang dilakukan sebagai hasil dari perkiraan situasi strategis. Sementara *means* mengacu pada sumber daya militer yang menentukan kekuatan suatu negara. Ketiga unsur tersebut harus seimbang dan kompatibel satu sama lain untuk mencapai keamanan nasional.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa strategi merupakan rencana dan tindakan suatu negara yang dilaksanakan melalui manuver politik di lingkup internasional melalui pengerahan sumber daya untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional. Teori strategi tersebut digunakan untuk menganalisis strategi politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi isu Papua di Pasifik Selatan.

2.1.3.3 Konsep Diplomasi Pertahanan

Peneliti menggunakan konsep Diplomasi Pertahanan yang dikembangkan oleh A. Cottey dan A. Forster dalam *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Menurut Barston (2013) diplomasi berkaitan dengan pengelolaan hubungan antar negara dan antar aktor lainnya dalam hubungan internasional. Jika dilihat dari perspektif negara, diplomasi berkaitan dengan perumusan dan implementasi politik luar negeri. Negara berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan, dan mengamankan kepentingan nasional melalui perwakilan resminya. Diplomasi sering dianggap berkaitan dengan kegiatan damai, meskipun mungkin terjadi dalam perang atau konflik bersenjata. Secara umum fungsi diplomasi dapat dipecah menjadi enam bidang besar berupa seremonial, manajemen, informasi dan komunikasi, negosiasi internasional, tugas perlindungan, dan bidang normatif. Dalam bukunya, Barston mengakui bahwa diplomasi merupakan sebuah subjek perubahan yang konstan dan bukanlah pergeseran besar yang merupakan bentuk baru. Untuk itu ilmu diplomasi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan munculnya ancaman terhadap perdamaian dunia, aktivitas diplomasi tidak hanya dilakukan oleh aktor negara. Diamond & McDonald (1996) menawarkan konsep diplomasi multi-jalur (*multi-track diplomacy*) yang dijalankan oleh pemerintah, kelompok, dan individu dengan menggunakan *soft power*. Diplomasi multi-jalur dilakukan oleh *Track One: Government, Track Two: Nongovernment/Professional, Track Three: Business, Track Four: Private Citizen, Track Five: Research, Training, and Education, Track Six: Activism, Track Seven: Religion, Track Eight: Funding, Track Nine: Communications and Media*.

Lebih lanjut, salah satu perkembangan ilmu diplomasi di bidang pertahanan dan militer adalah munculnya konsep diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan merupakan sebuah istilah yang relatif baru,

diciptakan sebagai respon terhadap kebutuhan pasca Perang Dingin untuk menamai fungsi dan tugas internasional yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dan pimpinan dari kementerian pertahanan suatu negara. Usaha mendefinisikan diplomasi pertahanan untuk pertama kali dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Inggris pada tahun 1998. Disampaikan oleh Dodd dan Oakes (1998, sebagaimana dikutip dalam Drab, 2018, p.60) bahwa Inggris mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai sebuah penggunaan pertahanan secara damai untuk mencapai hasil positif dalam pengembangan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara lain. Menurut mereka diplomasi pertahanan tidak termasuk operasi militer, melainkan mempromosikan bentuk-bentuk kerja sama seperti pertukaran personel, kunjungan kapal dan pesawat, kunjungan tingkat tinggi, dialog bilateral, pelatihan dan latihan, forum pertahanan regional, dan pembangunan kepercayaan serta non proliferasi.

A. Cottey dan A. Forster (2013) menawarkan definisi yang lebih luas mengenai diplomasi pertahanan dalam sebuah buku berjudul *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Mereka berpendapat bahwa diplomasi pertahanan melibatkan penggunaan angkatan bersenjata secara kooperatif pada masa damai dan infrastruktur terkait terutama kementerian pertahanan sebagai alat kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan. Diplomasi pertahanan bukan hanya menjadi alat *realpolitik*, tetapi juga telah menjadi sarana mengejar politik luar negeri dan keamanan yang lebih luas. Kerja sama pertahanan digunakan sebagai *strategic engagement* untuk membangun hubungan yang kooperatif dengan mantan atau musuh potensial, mempromosikan pembangunan demokrasi, dan membantu negara lain dalam membangun perdamaian. Aktivitas diplomasi pertahanan dijabarkan dalam sebuah tabel berikut:

Tabel 2.1 Aktivitas Diplomasi Pertahanan

• Kontak bilateral dan multilateral antara militer senior dan sipil.
• Pengangkatan atase pertahanan negara asing.
• Perjanjian kerja sama pertahanan bilateral.
• Pelatihan personel pertahanan militer dan sipil asing.
• Penyediaan keahlian dan nasihat tentang kontrol demokratis angkatan bersenjata, manajemen pertahanan dan bidang teknis militer.
• Kontak dan pertukaran antara personel dan unit militer, dan kunjungan kapal.
• Penempatan personel militer atau sipil dalam angkatan bersenjata atau kementerian pertahanan mitra.
• Penempatan tim pelatihan.
• Penyediaan peralatan militer dan bantuan material lainnya.
• Latihan militer bilateral atau multilateral untuk tujuan pelatihan.

Sumber: Cottey & Foster (2013)

Selanjutnya dalam sebuah tesis berjudul *Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*, Idil Syawfi (2009) menemukan tiga karakter utama dari diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh negara berupa (1) *defense diplomacy for confidence building measures*, (2) *defense diplomacy for defense capabilities*, dan (3) *defense diplomacy for defense industry*. *Defense diplomacy for confidence building measure* bertujuan untuk menurunkan ketegangan dan atau mispersepsi sehingga akan menurunkan kemungkinan terjadinya konflik fisik berupa peperangan. Diplomasi pertahanan tersebut dilakukan dengan beberapa cara dalam tataran level yang berbeda seperti kerja sama militer dalam hal politik, kerja sama militer untuk transparansi, diplomasi pertahanan untuk membangun persepsi kepentingan bersama, kerja sama pertahanan untuk mengubah pola pikir negara mitra, kerja sama pertahanan untuk reformasi militer, dan bantuan pertahanan sebagai insentif untuk membangun kerja sama di bidang lain (Cottey & Foster, 2013).

Defense diplomacy for defense capabilities dilaksanakan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan negara dalam lingkup internal maupun eksternal. Negara membangun kapabilitas pertahanan melalui diplomasi dalam rangka menghadapi ancaman, dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Kerja sama strategis dalam bantuan militer.
- b. Pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kredit ekspor.
- c. Pembangunan *military base*.
- d. Pemberian payung keamanan dari negara inti ke negara satelit maupun sebaliknya.

Defense diplomacy for defense industry adalah bentuk diplomasi yang dilakukan dengan tujuan pembangunan industri pertahanan kedua belah pihak yang terlibat. Peningkatan industri pertahanan di suatu negara dapat menimbulkan efek pengganda bagi kemandirian politik dan ekonomi serta menurunkan ketergantungan impor alutsista bagi kapabilitas pertahanan dalam negeri. Diplomasi bentuk ini dilakukan melalui kerja sama strategis produksi alat persenjataan, penelitian dan pengembangan, pemberian lisensi, penanaman investasi, dan alih teknologi.

Peneliti menyimpulkan bahwa diplomasi pertahanan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam ranah militer dan pertahanan untuk mengatasi berbagai ancaman tradisional dan non tradisional dengan tujuan memperkuat pertahanan negara dan keamanan di kawasan. Konsep diplomasi pertahanan merupakan sebuah pisau analisis bagi peneliti untuk menjelaskan bagaimana implementasi, tujuan, dan implikasi dari aktivitas diplomasi Indonesia terhadap Australia dalam konteks isu Papua di Pasifik Selatan. Asumsi dasar dari perspektif diplomasi pertahan tersebut adalah bahwa kerja sama dan bentuk hubungan internasional lain di bidang pertahanan akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan Australia kepada Indonesia dalam konteks isu Papua. Kepercayaan tersebut merupakan media untuk mendekati dan

membangun negara-negara di Pasifik Selatan, terutama terhadap mereka yang masih mendukung kemerdekaan Papua.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan kajian mengenai produk-produk tulisan akademis dari berbagai sumber yang berguna bagi peneliti dalam membantu mengetahui permasalahan penelitian, mengecek keaslian masalah penelitian, memperluas wawasan mengenai topik yang analisis, memberikan gambaran kerangka berpikir, membantu menyusun asumsi awal, dan mempertajam analisis. Beberapa tulisan akademis relevan yang menjadi rujukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Sebuah artikel oleh Joanna Wallis dengan judul ***Is Oceania a Regional Security Complex?*** yang merupakan bagian pertama dari buku berjudul ***A Region in Transition: Politics and Power in the Pacific Island Countries***. Diterbitkan oleh Saarland University Press, tulisan tersebut mengemukakan argumen bahwa wilayah Oceania, atau sering disebut juga sebagai Pasifik Selatan, dapat diklasifikasikan sebagai *regional security complex* berdasarkan Regional Security Complex Theory (RSCT) yang ditawarkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver. Sejak tahun 1990an, tantangan keamanan telah muncul dan ter-sekritisasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Oceania membentuk pola interaksi dan pola ketergantungan yang semakin dalam dan kuat. Organisasi regional PIF memainkan peranan besar dalam proses sekritisasi, interaksi dan interdependensi. Selain itu, Australia dan Selandia Baru sebagai kekuatan regional juga memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan keamanan di wilayah Oceania. Kedua negara tersebut memandang bahwa Oceania adalah *arc of instability* yang dapat membahayakan kepentingan mereka (Wallis, 2016).

- b. Penelitian oleh Greta Nabbs-Keller dengan judul ***Understanding Australia-Indonesia Relations in the Post-Authoritarian Era: Resilience and Respect*** yang diterbitkan di jurnal Australian Journal of International Affairs pada bulan Februari tahun 2020. Penelitian ini menganalisis hubungan Indonesia dan Australia pasca era reformasi dalam dua variabel utama *resilient* dan *respect*. Selama dua puluh tahun terakhir, hubungan di antara kedua negara mengalami dinamika. Pergeseran kebijakan Indonesia karena kebangkitan politik dan ekonomi internasional menjadi salah satu penyebab ketenggangan bilateral. Namun begitu, Greta Nabbs-Keller menemukan bahwa hubungan Indonesia dan Australia tetap dapat bertahan terlepas dari semua ketegangan yang terjadi. Hal tersebut terjadi karena para elit politik luar negeri mengedepankan asas utilitas hubungan untuk mempertahankan stabilitas dan kemakmuran terutama di kawasan Indo-Pasifik (Nabbs-Keller, 2020).
- c. Penelitian oleh Floranesia Lantang dan Edwin M. B. Tambunan dengan judul ***The Internationalization of "West Papua" Issue and Its Impact on Indonesia's Policy to the South Pacific Region*** yang diterbitkan di Journal of ASEAN Studies (JAS) pada Agustus tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan internasionalisasi isu Papua yang terjadi di sosial media dan perubahan respon pemerintah Indonesia terhadap negara-negara di Pasifik Selatan. Lantang & Tambunan (2020) menemukan bahwa strategis para aktivis pro kemerdekaan yang mendengungkan isu Papua mengenai HAM melalui media sosial berhasil meningkatkan perhatian and dukungan dari kawasan Pasifik Selatan. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan usaha pemerintah Indonesia selama ini hanya sebatas pada mempersempit kesenjangan informasi alih-alih mengurangi internasionalisasi isu Papua secara nyata.

- d. Penelitian oleh Pangihutan Panjaitan, Jonni Mahroza, dan Pujo Widodo yang berjudul ***Indonesia Defense Diplomacy: Papua's Problem Perspective***. Penelitian tersebut diterbitkan di Technium Social Sciences Journal pada bulan April 2020. Dengan berkaca pada fenomena lepasnya Timor Timur dari Indonesia di tahun 1999, Panjaitan dkk menuliskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mencegah disintegrasi Papua melalui jalur diplomasi pertahanan. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat kapasitas Indonesia di forum regional seperti ASEAN dan UN. ASEAN memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memformulasikan strategi pertahanan nasional untuk menjaga Papua melalui ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) (Panjaitan et al., 2020). Keluaran dari penelitian ini adalah bahwa manuver Indonesia melalui langkah diplomasi menimbulkan keyakinan bahwa permasalahan di Papua adalah masalah dalam negeri Indonesia. Dengan demikian tekanan dari dunia internasional atas konflik tersebut dapat diakhiri.
- e. Penelitian oleh Jenny Hayward-Jones dengan judul ***Australia and Security in the Pacific Islands Region*** yang merupakan Bab 5 dari sebuah buku berjudul ***Regionalism, Security & Cooperation in Oceania***. Diterbitkan oleh Asia-Pacific Center for Security Studies pada Juni tahun 2015, tulisan ini menjelaskan bahwa Australia telah menjadi kekuatan dominan di Pasifik Selatan selama tiga dekade terakhir (Hayward-Jones, 2015). Kawasan tersebut telah lama menarik sejumlah kekuatan besar dunia untuk meraih kepentingan nasional, tetapi begitu belum ada tanda-tanda bahwa kawasan tersebut telah menjadi objek dari kompetisi para kekuatan besar. Kekuatan Australia di kawasan tergambar dari inisiatifnya untuk menjadi pihak terdepan dalam mengatasi ancaman tradisional dan non tradisional di kawasan. Jenny Hayward-Jones menyimpulkan bahwa Australia mungkin tidak selalu menjadi pihak yang berpengaruh dari perspektif ekonomi, tetapi selalu menjadi kekuatan

yang sangat diperlukan di kawasan jika dilihat dari perspektif keamanan.

Lima penelitian di atas merupakan produk tulisan akademis yang memiliki relevansi terhadap tesis yang disusun oleh peneliti. Relevansi penelitian secara umum terdapat pada persamaan kajian mengenai Australia dan Pasifik Selatan dan secara khusus terdapat pada kajian mengenai internasionalisasi isu Papua. Lima penelitian tersebut ditampilkan kembali dalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam mendeteksi relevansi melalui perbandingan hasil, persamaan, dan perbedaan penelitian dengan tesis peneliti.

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis. (Tahun). Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Joanna Wallis. (2016). <i>Is Oceania a Regional Security Complex?</i>	<i>Regional security complex</i> telah terbentuk di Oceania. Pola interaksi dan saling ketergantungan muncul untuk mengatasi masalah keamanan. Dengan demikian mustahil untuk menganalisis masalah keamanan dengan memisahkan negara-negara di wilayah tersebut, termasuk Australia yang berperan besar dalam mengatasi masalah tersebut.	Persamaan terdapat pada lokus penelitian yaitu wilayah Oceania atau Pasifik Selatan.	Penelitian yang dilakukan oleh Joanna Wallis menganalisis terbentuknya regional security complex di Oceania, sedangkan tesis ini membahas mengenai strategi diplomasi pertahanan Indonesia dengan Australia terhadap masalah keamanan di Oceania.

2	Greta Nabbs-Keller. (2020). <i>Understanding Australia-Indonesia Relations in the Post-Authoritarian Era: Resilience and Respect.</i>	Hubungan Indonesia-Australia mengalami dinamika pasca era reformasi. Meskipun begitu hubungan kedua negara tetap bertahan di tengah ketegangan yang terjadi. Para elit politik luar negeri mengedepankan asas utilitas hubungan untuk mempertahankan stabilitas dan kemakmuran terutama di kawasan Indo-Pasifik	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia.	Tesis ini membahas mengenai strategi diplomasi pertahanan Indonesia dengan Australia. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai dinamika hubungan Indonesia-Australia pasca reformasi.
3	Floranesia Lantang dan Edwin M. B. Tambunan. (2020). <i>The Internationalization of "West Papua" Issue and Its Impact on Indonesia's Policy to the South Pacific Region.</i>	Media sosial berpengaruh besar pada usaha internasionalisasi isu Papua terhadap dukungan negara Pasifik Selatan. Indonesia lebih memilih mempersempit kesenjangan informasi daripada mengurangi internasionalisasi isu tersebut secara nyata.	Persamaan di antara kedua penelitian adalah lingkup pembahasan mengenai internasionalisasi isu Papua di kawasan Pasifik Selatan.	Topik penelitian berfokus pada penggunaan media sosial sebagai alat internasionalisasi suatu itu. Sedangkan tesis berfokus pada posisi strategis Australia dan bagaimana implementasi strategi diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara tersebut.
4	Pangihutan Panjaitan, Jonni Mahroza, dan Pujo Widodo. (2020). <i>Indonesia Defense</i>	Berkaca pada lepasnya Timor Timur, langkah diplomasi menjadi penting untuk	Persamaan di antara keduanya terdapat pada kajian mengenai isu Papua dan	Obyek penelitian berfokus pada diplomasi pertahanan

	<i>Diplomacy: Papua's Problem Perspective</i>	menghentikan tekanan dunia internasional atas konflik Papua. Salah satu caranya adalah penguatan diplomasi pertahanan di ADMM.	diplomasi pertahanan untuk menyelesaikan isu tersebut.	Indonesia di forum ADMM.
5	Jenny Hayward-Jones. (2015) <i>Australia and Security in the Pacific Islands Region.</i>	Australia merupakan kekuatan dominan di Kepulauan Pasifik selama tiga dekade terakhir. Meski secara ekonomi tidak selalu menjadi yang terdepan, pengaruh kekuatan Australia selalu dibutuhkan jika dilihat dari perspektif keamanan.	Persamaan dapat ditemukan pada pembahasan mengenai pengaruh Australia di kawasan Pasifik Selatan.	Perbedaan di antara penelitian dan tesis terdapat pada kajian dan analisis dan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Australia mengenai internasionalisasi isu Papua.

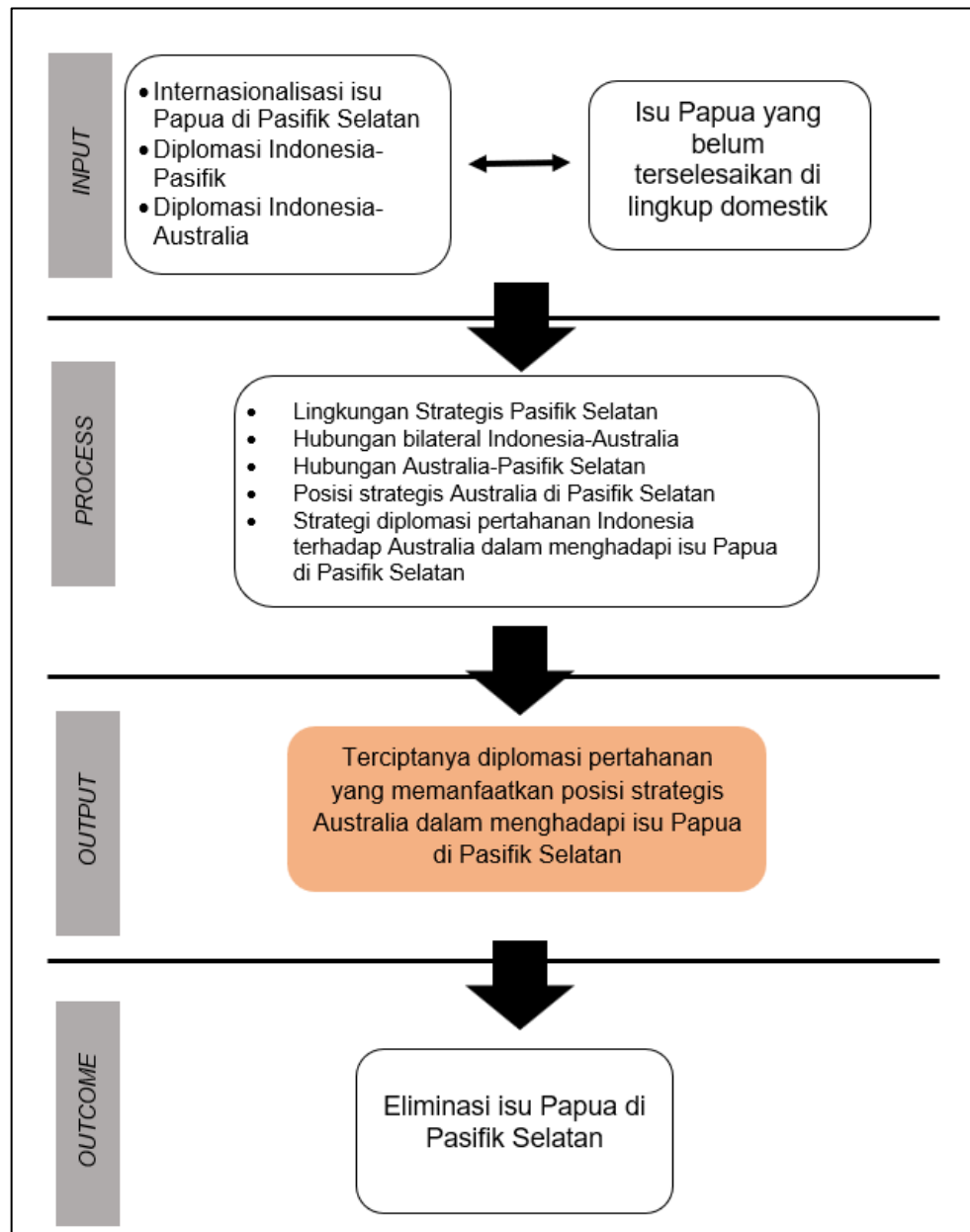
Sumber: diolah oleh peneliti

2.3 Kerangka Pemikiran

Konsep alur pemecahan masalah dalam tesis ini dimulai dengan dinamika hubungan Indonesia dengan Australia dalam konteks isu Papua yang telah ter-internasionalisasi di wilayah Pasifik Selatan. Indonesia berusaha mendekati Australia dalam usaha menghadapi isu tersebut. Terlepas dari berbagai ketegangan yang telah terjadi, Australia merupakan negara yang mendukung penuh kedaulatan Indonesia dan menolak berbagai bentuk gerakan separatisme. Dukungan tersebut tertuang dalam

Traktat Lombok yang telah ditandatangani oleh kedua negara. Di sisi lain Australia merupakan negara yang mempunyai pengaruh yang besar di Pasifik Selatan. Australia telah menjadi hegemon di kawasan tersebut selama tiga dekade terakhir. Berdasarkan pernyataan tersebut, posisi strategis Australia di Pasifik Selatan (poin pertama tujuan penelitian) akan dianalisis menggunakan teori posisi strategis, RSCT, dan teori kekuatan regional untuk menemukan penjelasan mengenai kekuatan dan kelemahan Australia, dan peluang dan ancaman Australia di kawasan tersebut.

Posisi strategis yang dimiliki oleh Australia merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia dalam menghadapi isu Papua. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia dapat menguntungkan Indonesia dalam menghadapi ancaman tradisional tersebut. Hubungan bilateral kedua negara dapat dilihat melalui berbagai bentuk lobi internasional dan diplomasi, salah satunya adalah melalui diplomasi pertahanan. Sebagai konsep yang relatif baru dalam instrumen politik luar negeri, diplomasi pertahanan berpotensi membantu Indonesia menghadapi ancaman internasionalisasi isu Papua melalui peran dan posisi strategis Australia. Untuk itu peneliti menganalisis rumusan strategi diplomasi pertahanan yang tepat terhadap Australia dalam rangka menghadapi ancaman tersebut (poin kedua tujuan penelitian) dengan menggunakan teori strategi, teori *secession*, konsep diplomasi pertahanan, dan konsep pertahanan negara. Alur kerangka pemikiran tesis ini dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Tesis

Sumber: diolah oleh peneliti